

KOLABORASI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Presidensi G20 Indonesia mendorong tiga agenda utama pembahasan seputar kesehatan, transformasi ekonomi, dan transisi energi.

Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan ketiga yang diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 setelah Arab Saudi pada 2020 dan Italia pada 2021. Namun, Presidensi Indonesia dianggap sebagai periode yang sangat krusial bagi proses pemulihan ekonomi global di tengah ketidakpastian pandemic.

Mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger", menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiwono Moegiarso, Presidensi G20 Indonesia mendorong tiga agenda utama pada pembahasan Jalur Sherpa G20, yakni Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital, dan Transisi Energi. Jalur pembahasan lain forum G20 adalah Jalur Keuangan (*Finance Track*) yang berfokus pada isu ekonomi.

Dia menjelaskan, agenda Arsitektur Kesehatan Global merupakan upaya Indonesia untuk memperkuat dan menyusun kembali tata kelola dan arsitektur kesehatan global pasca pandemi. Kemudian, agenda Transformasi Ekonomi Berbasis Digital merupakan langkah membangun kembali tata kelola dan arsitektur ekonomi global melalui digitalisasi.

Sedangkan agenda Transisi Energi digagas guna memperkuat komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih demi mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. "Ketiga agenda tersebut akan menjadi panduan



Suasana ruang tunggu vaksinasi Covid-19 di salah satu puskesmas di Jakarta.



bagi para pemimpin G20 dalam menelurkan kebijakan yang pro-rakyat dan konkret," kata Susiwiwono.

Dia mengatakan semua agenda pada Jalur Sherpa G20 berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Salah satu materi pembahasan dalam Arsitektur Kesehatan Global adalah program vaksinasi Covid-19. "Masih banyak negara, terutama di Afrika, yang belum memenuhi target vaksinasi 70 persen (dari populasi)," kata dia.

Susiwiwono yang juga menjabat Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track pada Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia mengungkapkan, melalui agenda Arsitektur Kesehatan Global G20 ingin menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

Dia mengatakan Deklarasi Konferensi

Tingkat Tinggi G20 Roma 2021 telah menegaskan komitmen untuk menyediakan akses vaksin yang terbuka, aman, terjangkau, dan efektif bagi negara-negara berpendapatan rendah; serta transfer teknologi dan pendirian mRNA hub di Afrika Selatan, Brasil, dan Argentina untuk meningkatkan produksi dan distribusi vaksin.

"Tujuan dari komitmen-komitmen itu ialah mencapai target vaksinasi global sebanyak 40 persen populasi di semua negara pada akhir 2021, dan 70 persen pada pertengahan 2022," ucapnya.

Indonesia per 25 Maret 2022 sudah berhasil mencapai cakupan vaksinasi dosis ke-1 sebanyak 195,49 juta jiwa atau 71,38 persen dari populasi; dosis ke-2 156,68 juta jiwa (57,21 persen), dan dosis penguat 16,64 juta jiwa (6,81 persen). Indonesia berupaya memenuhi target vaksinasi global pada tahun ini.

Sebagai upaya memulihkan kesehatan dunia, ujar dia, Presidensi G20 Indonesia

yang terdampak Covid-19 melalui *special drawing rights channeling* dan *debt service suspension initiative*. Begitu pula penguatan arsitektur keuangan internasional juga terus dilakukan, termasuk melalui aliran modal berkelanjutan dan pengembangan pasar modal mata uang lokal, maupun menegaskan kembali komitmen terhadap Global Financial Safety Net.

Dia mengakui, fluktuasi suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) menjadi tantangan dalam menetapkan kebijakan moneter di banyak negara, termasuk Indonesia. Bank Indonesia, kata Menteri, telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi berupa kebijakan moneter, seperti memperkuat nilai tukar, menjaga tingkat suku bunga acuan, serta menjaga likuiditas.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah dan terus berupaya mengurangi dampak volatilitas perekonomian global, salah satunya dengan meningkatkan porsi kepemilikan domestik terhadap Surat Berharga Negara (SBN). "Indonesia mengusulkan tindakan yang sama dalam forum G20, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi global, khususnya bagi negara berkembang, dapat lebih tahan terhadap dinamika perekonomian dari luar."

Selanjutnya, dalam hal agenda dukungan terhadap pembayaran digital, keuangan berkelanjutan, dan inklusi keuangan, Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah Indonesia sudah menggiatkan ketiga sektor ini secara masif di dalam negeri, walaupun literasi dan aspek keamanan masih menjadi tantangan.

Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia naik hingga 90 persen pada 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan nasional 2019 baru sebesar 76,19 persen dengan tingkat literasi keuangan 38,03 persen.

Ia memaparkan, untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda, Kementerian Keuangan telah menjalin kerja sama dengan BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan membentuk Forum Koordinasi Pembiayaan



2nd Finance and Central Bank Bank Deputies Meeting, Selasa-Rabu, 15-16 Februari 2022. Dok: G20.ORG

Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK).

Buat memuluskan implementasi agenda Finance Track, Indonesia juga mendorong pembentukan arsitektur keuangan internasional yang lebih kuat. "Begitu pula untuk menjaga stabilitas keuangan perlu dipikirkan mengenai risiko siber dan peraturan yang menjangkau setiap transformasi bisnis," ucap Sri Mulyani.

Dia mengakui, negara berkembang masih menghadapi tantangan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan. Tantangan tersebut berhubungan dengan mobilisasi dan akses ke keuangan berkelanjutan. Menteri Sri Mulyani lantas mengusulkan penyelenggaraan seminar perihal cara terbaik membantu negara-negara berkembang.

Di samping itu, kata dia, harus ada tindakan yang menjamin ketersediaan pendanaan bagi transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Tindakan ini dibutuhkan untuk mendukung transisi yang tertib, adil, dan terjangkau menuju perekonomian rendah emisi dan ramah iklim.

Lebih lanjut, perihal agenda inklusi keuangan dan sistem pembayaran di era digital, ujar Sri Mulyani, pandemi Covid-19 kian menyulitkan kelompok rentan dan kurang terlayani secara finansial, terutama perempuan, pemuda, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Karena itu, ia ingin meneguhkan kembali komitmen untuk memajukan agenda inklusi keuangan, dan meminta platform Global Partnership for Financial Inclusion (GPFII) G20 mengembangkan kerangka inklusi keuangan untuk memanfaatkan digitalisasi. Tujuannya

meningkatkan produktivitas, mendorong keberlanjutan, dan menciptakan ekonomi inklusif bagi perempuan, pemuda, dan UMKM.

Ihwal agenda pajak internasional, Sri Mulyani menyatakan, pembahasan agenda itu dalam presidensi G20 Indonesia meliputi banyak aspek. Beberapa isu bersifat melanjutkan proses yang telah berjalan, seperti implementasi rencana aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

BEPS adalah praktik mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah. Sementara beberapa isu lain bersifat baru, seperti pajak dan kesetaraan gender, pajak lingkungan, serta pajak dan pembangunan.

Tidak hanya manfaat tidak langsung berupa perubahan kebijakan keuangan global, Indonesia sebagai tuan rumah G20 juga akan menerima manfaat langsung secara ekonomi maupun sosial budaya. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, rangkaian pertemuan G20 akan meningkatkan konsumsi domestik sebesar Rp 1,7 triliun; menambah produk domestik bruto nasional Rp 7,4 triliun; melibatkan UMKM, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 33 ribu orang.

Manfaat penting berikutnya dari Presidensi G20 bagi Indonesia adalah peningkatan citra positif dan kebanggaan di dunia internasional. "Dalam jangka panjang, *branding* Indonesia akan meningkatkan kepercayaan dari negara-negara lain." Ia juga meyakini Presidensi G20 dapat menambah wawasan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dia mengimbuhkan, manfaat langsung G20 juga akan dirasakan pada Jalur Sherpa (Sherpa Track). Banyak agenda pada jalur pembahasan itu yang berfokus langsung ke masyarakat, seperti digitalisasi UMKM, peningkatan keterampilan UMKM, maupun pembiayaan ultra mikro. "Dengan demikian, hasil dari forum ini dipastikan memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat." •

berniat mengembalikan kolaborasi global dan mengusulkan pembuatan panduan *guidance for flexible cooperation models of vaccine manufacturing* yang mengesampingkan sementara hak paten dan lisensi vaksin.

Berikutnya adalah perluasan mRNA *hub* yang mencakup kawasan Asia, di mana Indonesia mendorong kerja sama teknologi vaksin multi-*platform* dan memberikan insentif usaha bagi pendirian pusat produksi vaksin berbasis mRNA di dalam negeri.

Susiwijono berkata, Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara maju dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membantu negara-negara yang minim vaksin. Wujudnya adalah pertemuan antar menteri keuangan dan menteri kesehatan G20 yang menyepakati peningkatan koordinasi respons Sistem Kesehatan Global.

Belajar dari krisis Covid-19, para menteri bersepakat meningkatkan investasi kapasitas kesehatan, membangun pertahanan terhadap guncangan kesehatan, dan menangani kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan koordinasi antara pembuat kebijakan kesehatan dan keuangan, lembaga keuangan multilateral dan lembaga kesehatan global.

Kesepakatan berikutnya, kata dia, adalah pembentukan Gugus Tugas Kesehatan dan Keuangan Bersama (Joint Finance Health Task Force) G20 dengan tujuan meningkatkan dialog dan kerja sama global ihwal isu-isu yang berkaitan dengan *pandemic prevention, preparedness, and response (pandemic PPR)*, serta pertukaran pengalaman.

Kesepakatan lainnya yakni mengembangkan koordinasi antara kementerian keuangan dan kementerian kesehatan dalam penanganan keadaan darurat kesehatan lintas batas. "Kemudian, mengembangkan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk *pandemic PPR* dan mengadopsi pendekatan *one health*," ujar Susiwijono.

Menurut dia, Joint Finance Health Task Force dipimpin bersama oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Gugus tugas itu dibantu oleh Sekretariat di WHO dan didukung oleh Bank



Ilustrasi bisnis digital. Dok: Shutterstock

Dunia. Demi memastikan inklusivitas, keterwakilan, dan cakupan geografis, anggota gugus tugas terdiri dari negara-negara G20, non-G20, organisasi regional, dan organisasi internasional "Diharapkan ada kesepakatan tentang *pandemic PPR* di bawah gugus tugas yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia memperkuat dan menyusun kembali tata kelola dan arsitektur kesehatan global pasca pandemi," Susiwijono menuturkan.

Selanjutnya, salah satu isu prioritas yang akan dibahas oleh Health Working Group G20 adalah membangun ketahanan sistem kesehatan dunia. Pada kelompok kerja itu bakal dibahas soal bagaimana G20 dapat berkontribusi terhadap mekanisme *pooling resources*, termasuk teknikal, finansial, dan keahlian yang dapat diakses oleh seluruh negara.

Indonesia akan mendorong langkah inovatif dalam penyediaan vaksin dan obat secara mandiri dengan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta dalam mewujudkan arsitektur kesehatan global yang lebih berketahanan dan inklusif. "Investasi dan pendanaan (sektor kesehatan) harus bisa dimobilisasi secara cepat untuk mencegah krisis selanjutnya," ujar Susi.

Untuk menerapkan isu-isu di Jalur Sherpa yang meliputi isu energi, lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia meminta G20 memberi teladan. "Indonesia akan mengubah mimbar narasi menjadi parade aksi," kata Susiwijono.

Ia juga meminta negara maju menepati janji dukungan pendanaan

dan teknologi ramah lingkungan bagi negara berkembang. pembiayaan bagi transformasi energi dan konservasi merupakan kebutuhan mutlak dalam menangani isu perubahan iklim.

Transisi energi memerlukan pembiayaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau. Persoalannya, banyak negara berkembang yang justru kaya akan sumber energi berbasis fosil, seperti minyak bumi dan batu bara. "Oleh karena itu, untuk melaksanakan transisi energi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kerja sama, baik di tingkat domestik maupun global," tuturnya.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan BUMN dan swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau. Bukan hanya terjangkau dari sisi pelaku usaha, tetapi juga dari sisi konsumen. Sementara dari aspek keuangan negara, implikasi transisi energi terhadap subsidi dan penerimaan perpajakan harus diperhitungkan supaya tidak membebani APBN.

Jalur Sherpa akan membahas pula isu pertanian yang berkait dengan ketersediaan pangan. Isu ini penting lantaran pandemi telah memicu masyarakat untuk beradaptasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan layanan digital. Pertanian 4.0 atau *smart farming* termasuk di dalamnya.

Presidensi G20 Indonesia juga akan mengangkat agenda yang berkaitan dengan Pertanian 4.0, di antaranya membangun sistem pertanian dan pangan berkelanjutan dan tangguh (*building a resilient and sustainable food system and agriculture*), mempromosikan perdagangan produk pertanian yang transparan (*promoting an open, predictable, and transparent agricultural trade to increase productivity*), serta pertanian inovatif (*innovative agri-preneurial through digital agriculture to improve livelihood of farmers in rural areas*).

"Melalui percepatan realisasi program-program itu, Presidensi G20 Indonesia diharapkan bisa memberikan manfaat untuk pembangunan berkelanjutan, serta menjadi warisan Indonesia bagi G20," ujar Susiwijono.●